

# ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA

**Bagus Handoko, S.E.,M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**Anggi Pratama Nst, S.E.,M.Si**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*

**May Sarah**

*Mahasiswa Akuntansi Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI .Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari: website.www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota, dengan Jumlah sampel yang diteliti 15 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota. Tahun amatan APBD yang dipakai yaitu 7 tahun (tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara

Kata Kunci: Profitabilitas, Kebijakan Dividen, BEI

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan istilah desentralisasi. Menurut Undang -Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah, setiap daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerahnya untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom, peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup kuat. Implikasinya terhadap daerah adalah menjadikan daerah memiliki peranan yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pembangunan memiliki kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

APBD merupakan instrumen kebijakan daerah. Belanja modal terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja

modal merupakan pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan biaya pemeliharaan.

Menurut Darise (2008:67), kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, demikian juga sebaliknya semakin sedikit belanja yang dapat dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Menurut Deddi (2007:93), cara mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, maka harus dihitung menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Sedangkan rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari periode sebelumnya, baik dari segi pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pertumbuhan belanja pembangunan.

Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada dimana Dinas Pendapatan Daerah Sumatra Utara tak muluk-muluk menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 yakni hanya Rp.35,54 miliar menjadi Rp.4,22 triliun dari RAPBD-P 2016 Rp.4,19 triliun. Pemicunya yakni proyeksi pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor dan air permukaan umum yang cenderung stagnan. Kepala Dispenda Sumut Sarmadan menyebutkan, dari total proyeksi PAD pada tahun depan, pajak daerah masih mendominasi yakni Rp.4,2 triliun. Sisanya yakni pendapatan denda pajak Rp.27,27 miliar (<http://finansial.bisnis.com>). Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :“Pengaruh Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI”.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Riswan (2014:81), kemandirian keuangan daerah adalah: Kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

## 2. Rasio Efektivitas

Menurut Riswan(2014:82), efektivitas adalah:Kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan.

## 3. Rasio Efisiensi Pajak

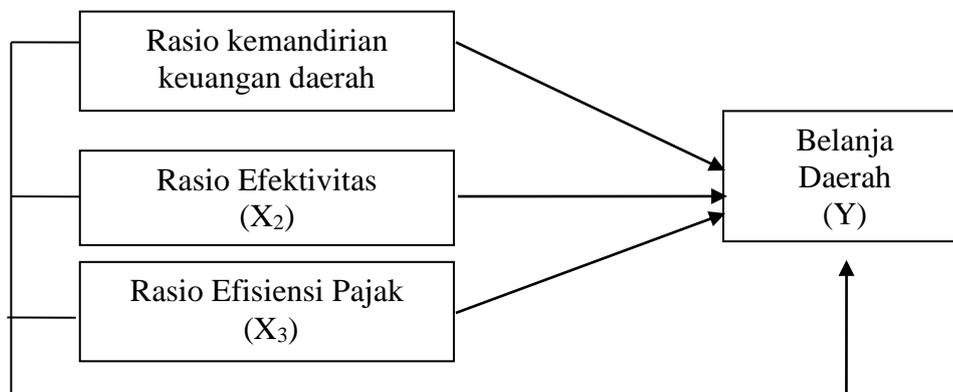
Menurut Riswan(2014:82), efisiensi adalah: Perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

## 4. Belanja Daerah

Menurut Riswan(2014:76), belanja daerah adalah Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang meliputi belanja operasional dan belanja modal serta belanjalain-lain/tidak tersangka.

## B. Hipotesis Penelitian & Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan teori, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan Kerangka Konseptual di Atas, berikut hipotesisnya:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Rasio efektivitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Rasio efisiensi pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. (Erlina, 2007 : 12).

### B. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

#### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan

masalah penelitian (Erlina, 2007 : 81). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 Kabupaten/Kota.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina, 2007 : 82). Dalam memilih sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (Erlina, 2007 : 88). Jumlah sampel yang diteliti 15 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota. Tahun amatan APBD yang dipakai yaitu 7 tahun (tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016).

Adapun kriteria yang ditetapkan penulis dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah :

- a. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan APBD Sumatera Utara dari tahun 2010 – 2016 di [djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id).
- b. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara continue dari tahun 2010 – 2016 di [djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id).

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis menetapkan bahwa jumlah data yang diobservasi sebanyak 105 data (15 sampel x 7 tahun)

## C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu dokumen mengenai data penelitian, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

## D. Teknik Analisis Data

### 1. Statistif Deskriptif

Statistik deskriptif proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

#### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah pengujian yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum peneliti mengolah data. Dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 dan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Dalam suatu penelitian model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Korelasi diantara variabel independen dapat bermakna adanya kemiripan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Nilai *variance inflation factor* (VIP) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi karena adanya waktu observasi penelitian yang berurutan antar satu penelitian dengan penelitian lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Cara menguji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin Watson*. Apabila nilai *Durbin Watson* < 2, maka tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah (*Dependent Variabel*)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

$X_1$  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (*Independent Variabel*)

$X_2$  = Rasio Efektivitas (*Independent Variabel*)

$X_3$  = Rasio Efisiensi Pajak (*Independent Variabel*)

$\epsilon$  = Error term

### 4. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dapat dilihat melalui uji regresi dengan menggunakan SPSS yaitu apabila p-value (sig) lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 (5 %) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengaruh tersebut dilihat melalui hasil regresi dengan menggunakan SPSS p-value (sig) yaitu jika nilai p-value (sig) lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,05 (5 %) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dapat diketahui dengan mengolah data dengan menggunakan SPSS yang merupakan nilai R square. Namun untuk regresi linear berganda sebaiknya menggunakan R square yang disesuaikan atau Adjusted R square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar antara 0 sampai 1.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

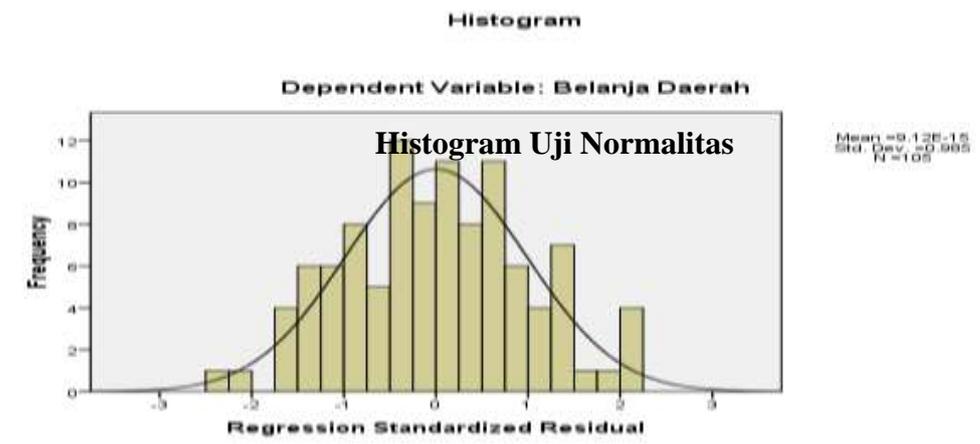
### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pengujian Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas data

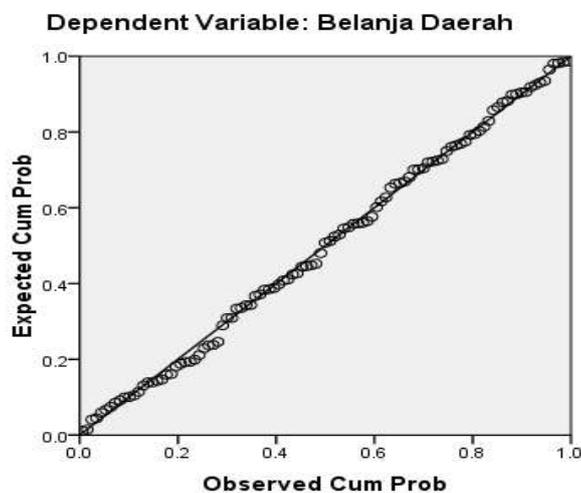
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:



Berdasarkan gambar 4.1 di atas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat memberikan hasil yang meragukan khususnya untuk jumlah sampel kecil.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**PP Plot Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal

“Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik.”

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

**Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                 |                | Unstandardized Residual |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                               |                | 105                     |
| Normal Parameters <sup>a</sup>  | Mean           | .0000000                |
|                                 | Std. Deviation | .44541658               |
| Most Extreme Differences        | Absolute       | .043                    |
|                                 | Positive       | .043                    |
|                                 | Negative       | -.027                   |
| Kolmogorov-Smirnov Z            |                | .438                    |
| <b>Asymp. Sig. (2-tailed)</b>   |                | <b>.991</b>             |
| a. Test distribution is Normal. |                |                         |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig Kolmogorov-Smirnov adalah 0,991. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen,”. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF. Nilai yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Tingkat koloneteritas yang dapat ditolerir adalah nilai *tolerance* 0,10. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya VIF :

**Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |  | Unstandardized Coefficients |            | T      | Sig. | Collinearity Statistics |              |
|-------|--|-----------------------------|------------|--------|------|-------------------------|--------------|
|       |  | B                           | Std. Error |        |      | Tolerance               | VIF          |
| 1     | (Constant)                               | 13.865                      | .217       | 63.843 | .000 |                         |              |
|       | <b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b> | 159.245                     | 26.657     | 5.974  | .000 | <b>.590</b>             | <b>1.695</b> |
|       | <b>Rasio Efektivitas</b>                 | -19.916                     | 11.527     | -1.728 | .087 | <b>.924</b>             | <b>1.083</b> |
|       | <b>Rasio Efisiensi Pajak Daerah</b>      | -.946                       | .580       | -1.633 | .106 | <b>.599</b>             | <b>1.669</b> |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Untuk Variabel rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,590 dan VIF sebesar 1,695. Variabel rasio efektivitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,924 dan VIF sebesar 1,083. Variabel rasio efisiensi pajakdaerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,599 dan VIF sebesar 1,669. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi.

c. Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode (t-1) atau

sebelumnya,”. Untuk uji Durbin adalah dengan melihat model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* berada di bawah angka 2.

### Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .690 <sup>a</sup> | .476     | .460              | .45198                     | 1.114         |

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa angka Durbin Watson 1,114 < 2, sehingga terbebas dari autokorelasi.

## 2. Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

### Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>

| Model |                                   | Unstandardized Coefficients |            | T      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |                                   | B                           | Std. Error |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)                        | 13.865                      | .217       | 63.843 | .000 |                         |       |
|       | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 159.245                     | 26.657     | 5.974  | .000 | .590                    | 1.695 |
|       | Rasio Efektivitas                 | -19.916                     | 11.527     | -1.728 | .087 | .924                    | 1.083 |
|       | Rasio Efisiensi Pajak Daerah      | -.946                       | .580       | -1.633 | .106 | .599                    | 1.669 |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Tabel 4.6 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,865 + 159,245 X_1 - 19,916 X_2 - 0,946 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai belanja daerah (Y) adalah sebesar 13,865 juta.
- Jika terjadi peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 159,245 juta.
- Jika terjadi peningkatan rasio efektivitas sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan menurun sebesar 19,916 juta.
- Jika terjadi peningkatan rasio efisiensi pajak daerah sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan menurun sebesar 0,946 juta.

## 3. Uji Kesesuaian (Test Goodness Of Fit)

### a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual terhadap variabel dependen.

**Uji Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |  | Unstandardized Coefficients |            | T             | Sig.        | Collinearity Statistics |       |
|-------|--|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|
|       |  | B                           | Std. Error |               |             | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant)                               | 13.865                      | .217       | 63.843        | .000        |                         |       |
|       | <b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b> | 159.245                     | 26.657     | <b>5.974</b>  | <b>.000</b> | .590                    | 1.695 |
|       | <b>Rasio Efektivitas</b>                 | -19.916                     | 11.527     | <b>-1.728</b> | <b>.087</b> | .924                    | 1.083 |
|       | <b>Rasio Efisiensi Pajak Daerah</b>      | -.946                       | .580       | <b>-1.633</b> | <b>.106</b> | .599                    | 1.669 |

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji statistik t di atas, terbukti bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y). Hanya variabel rasio efektivitas ( $X_2$ ) dan rasio efisiensi pajak daerah ( $X_3$ ) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel:

- 1) Kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Hipotesis pertama mengenai variabel rasio kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung} 5,974 > t_{tabel} 1,660$  dan nilai signifikansi variabel rasio kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti nilai rasio kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

- 2) Rasio efektivitas ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Hipotesis pertama mengenai variabel rasio efektivitas ( $X_2$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung} -1,728 < t_{tabel} 1,660$  dan nilai signifikansi variabel rasio efektivitas ( $X_2$ ) adalah 0,087 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, hal ini berarti nilai rasio efektivitas ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

- 3) Rasio efisiensi pajak daerah ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap belanja daerah (Y) pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

Hipotesis pertama mengenai variabel rasio efisiensi pajak ( $X_3$ ) diketahui bahwa  $t_{hitung} -1,633 < t_{tabel} 1,660$  dan nilai signifikansi variabel rasio efisiensi pajak daerah ( $X_3$ ) adalah 0,106 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05, hal ini berarti nilai rasio efisiensi pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).

**b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

“Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat”.

**Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F             | Sig.                    |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|---------------|-------------------------|
| 1     | Regression | 18.723         | 3   | 6.241       | <b>30.550</b> | <b>.000<sup>a</sup></b> |
|       | Residual   | 20.633         | 101 | .204        |               |                         |
|       | Total      | 39.356         | 104 |             |               |                         |

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah  $30,550 > F_{tabel} 2,69$ , dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu rasio kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ), rasio efektivitas ( $X_2$ ) dan rasio efisiensi pajak daerah ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah ( $Y$ ).

### c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel belanja daerah. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel belanja daerah. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

**Koefisien Determinasi**  
Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .690 <sup>a</sup> | .476     | .460              | .45198                     | 1.114         |

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Dari tabel 4.9 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,460. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 46,0%, sedangkan sisanya sebesar 54,0% (100% - 46,0%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,460 yang artinya 46,0% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, dana bagi hasil dan lain-lain.

## B. Pembahasan

### 1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah terbukti signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Riswan (2014) dan Cicilia (2015), menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah terbukti signifikan terhadap belanja daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008:131). Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan :

- Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah
- Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Masalah kemandirian keuangan daerah merupakan masalah utama bagi banyak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena pelaksanaan pembangunan akan berjalan lancar dengan baik kalau didukung dengan keuangan (dana) yang memadai pula. Kemandirian dalam mengelola keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Halim (2008:132) mengemukakan bahwa, "Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah." Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2008:132). Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan rasio ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi. Merujuk pada pendapat diatas, dapat diuraikan indikator-indikator dari kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a. Pemerintah daerah mandiri dalam menggali dan mengelola sumber keuangan daerahnya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.
- c. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi ataupun asing semakin tinggi. Rasio ini juga menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dimana semakin rendah tingkat kemandiriannya semakin rendah pula partisipasi masyarakat pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerahnya.

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Walaupun masih tetap bergantung kepada pemerintah pusat. Rasio

kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, kemungkinan hal ini disebabkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara, mengalokasikan PAD kepada belanja-belanja lain selain belanja modal atau dengan kata lain belanja modal bukan menjadi prioritas sehingga kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah justru menurunkan alokasi belanja modal tahun berikutnya.

## 2. Pengaruh Rasio Efektivitas Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011), menunjukkan bahwa rasio efektivitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas pemungutan pajak adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan semakin efektifnya pemungutan pajak, maka akan semakin meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Potensi Wajib Pajak
- b. Potensi besarnya pajak yang ditetapkan
- c. Efektivitas pemungutan pajak
- d. Tarif pajak
- e. Dasar pajak (*tax base*)

Upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah yang salah satunya melalui efektivitas pemungutan pajak.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam merealisasikan apa yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar atau 100%. Dalam penelitian ini hasil yang tidak signifikan juga dipengaruhi karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan sehingga pengalokasian belanja daerah tidak terealisasi dengan efektif dan dapat menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sehingga itu pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara perlu melakukan reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Rasio efektivitas yang tinggi, mencerminkan kemampuan daerah yang sudah baik dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berpengaruh negatifnya rasio efektivitas terhadap alokasi belanja daerah, kemungkinan disebabkan oleh PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara tidak dialokasikan untuk belanja daerah namun untuk belanja lain, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja lain-lain. Hal ini akan berimbas pada terhambatnya pembangunan untuk kepentingan publik yang dibiayai dari belanja daerah.

### 3. Pengaruh Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011), menunjukkan bahwa rasio efisiensi pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas.

Pada sektor pelayanan publik suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Namun, dari sampel pada penelitian ini disebabkan tumpang tindihnya pendanaan pada suatu kegiatan dan tidak sesuai dengan implementasi anggarannya. Hal ini terlihat dari banyaknya layanan publik apa adanya secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang sesungguhnya.

Tingginya rasio efisiensi keuangan daerah kemungkinan disebabkan oleh tingginya realisasi pengeluaran namun tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan daerah, sehingga terjadi pemborosan belanja daerah namun tidak digunakan untuk belanja daerah secara maksimal. Selama ini, pengeluaran daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja operasional lainnya sedangkan porsi belanja daerah relatif kecil. Hal lain yang diduga menjadi penyebab rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah adalah kemungkinan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara tidak semuanya menerapkan Standar Analisis Biaya dalam menyusun anggaran kegiatan/program, sehingga kemungkinan banyak kegiatan/program tidak efisien (tidak wajar) dalam penganggaran biayanya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
2. Rasio efektivitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
3. Rasio efisiensi pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.

### B. Saran

Saran yang bisa diberikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Dalam meningkatkan belanja daerah pelayanan publik pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui implementasi dan pengawasan yang baik terhadap peraturan-peraturan yang ada tentang PAD dan juga belanja daerah. Tanpa peningkatan kinerja keuangan, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja daerah untuk pelayanan publik.

2. Untuk Pemerintah Daerah sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan kinerja instansi sehingga diharapkan akan menaikkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pajak daerah agar pengalokasian anggaran ke belanja daerah untuk pelayanan publik juga dapat meningkat.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2012. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Cicilia, Vera Sri Endah. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Universitas Sam Ratulangi.
- Darise, Nurlan, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Indeks*, Edisi Pertama. Jakarta.
- Deddi, Iswahyuni, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Cetakan Pertama. Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta.
- Handayani, Sri. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah).
- Permendagri No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riswan. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera). Universitas Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- [djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id)  
<https://news.detik.com/>  
<http://finansial.bisnis.com>